

BAB I

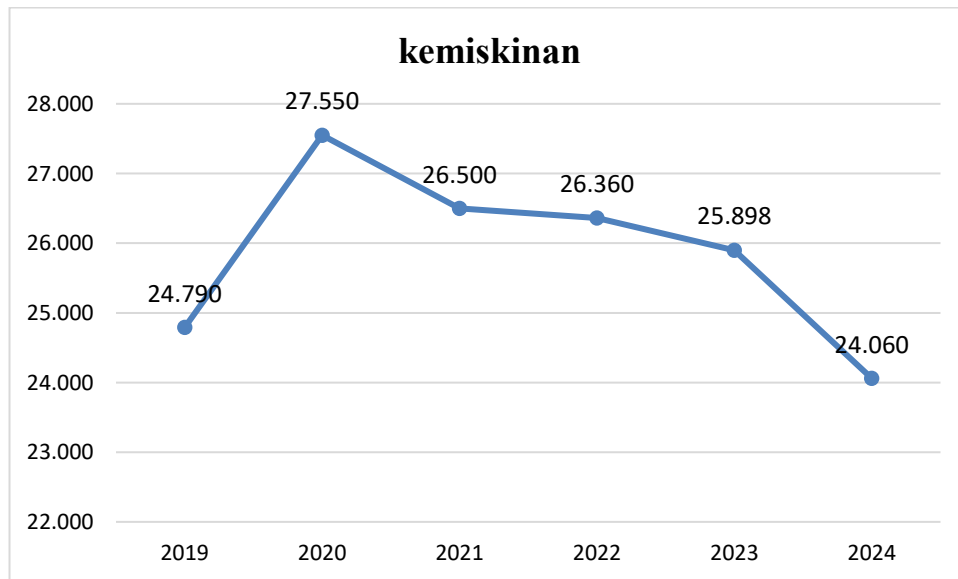
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional dan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta partisipasi dalam kehidupan sosial. Secara umum, kemiskinan merujuk pada kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya diukur dari aspek penghasilan, tetapi juga dari kualitas hidup secara keseluruhan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup secara layak (Mudawari et al., 2023). Sejalan dengan Setiyawan dalam Muttaqin & Anwar (2023) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi sosial ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan standar kehidupan masyarakat di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang saling berkaitan.

Kemiskinan di Indonesia merupakan isu yang telah berlangsung dalam jangka waktu panjang dan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan nasional. Berikut Gambar 1.1 Kemiskinan di Indonesia kurun waktu 2019 sampai dengan 2024.



Sumber Data Badan Pusat Statistik, 2024.

Gambar 1. 1 Kemiskinan di Indonesia Tahun 2019-2024 (Ribu Jiwa)

Berdasarkan Gambar 1.1 yang menunjukkan perkembangan kemiskinan di Indonesia tahun 2019 hingga 2024, terlihat bahwa kemiskinan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, kemiskinan tercatat sebesar 24.790 ribu jiwa, yang menggambarkan kondisi kemiskinan sebelum terjadinya krisis pandemi. Namun pada tahun 2020, angka kemiskinan meningkat tajam menjadi 27.550 ribu jiwa. Peningkatan ini terjadi akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi, meningkatnya pengangguran, penurunan pendapatan masyarakat, serta terbatasnya aktivitas produksi dan konsumsi. Banyak masyarakat yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan akhirnya terdorong kembali menjadi miskin karena kehilangan mata pencaharian.

Memasuki tahun 2021, jumlah penduduk miskin mulai mengalami penurunan menjadi 26.500 ribu jiwa. Penurunan ini menunjukkan adanya dampak dari program pemulihan ekonomi nasional, bantuan sosial, serta mulai

membbaiknya aktivitas ekonomi masyarakat. Tren penurunan terus berlanjut pada tahun 2022 menjadi 26.360 ribu jiwa, kemudian kembali turun pada tahun 2023 menjadi 25.898 ribu jiwa.

Pada tahun 2024, angka kemiskinan kembali menurun menjadi 24.060 ribu jiwa, yang hampir mendekati kondisi sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia masih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan belum sepenuhnya stabil.

Permasalahan kemiskinan tidak terlepas dari berbagai faktor penyebab yang kompleks. Murtala (2017) menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena masih adanya kelompok masyarakat yang belum memiliki kesempatan dan kemampuan yang memadai untuk mencapai taraf hidup yang layak. Selain itu, kemiskinan juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta ketimpangan distribusi pendapatan. Nurjannah et al., dalam Alvia et al., (2024) juga menyatakan bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang dihadapi hampir seluruh negara, baik negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia.

Di sisi lain, kemiskinan dapat dikurangi melalui kebijakan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja. Dalam teori ekonomi Keynesian, peningkatan aktivitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dapat mendorong permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga berpotensi menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam merancang kebijakan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan.

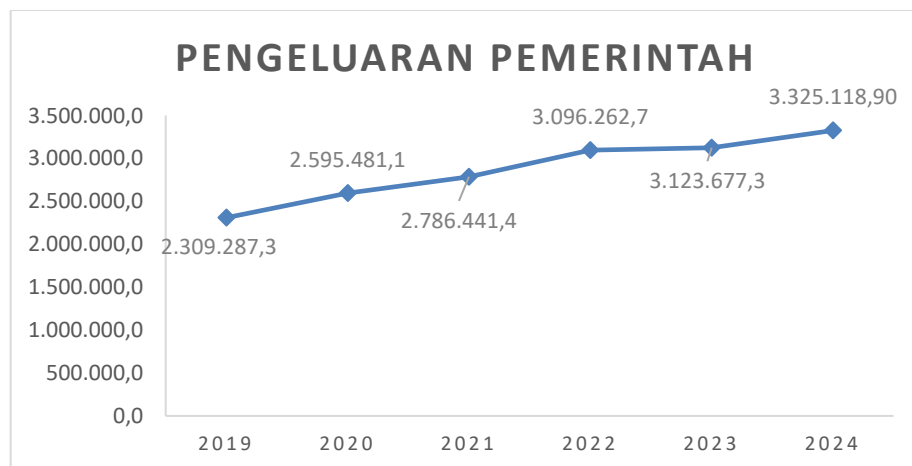
Salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dialokasikan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program perlindungan sosial diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas akses terhadap kebutuhan dasar. Dengan meningkatnya belanja negara yang tepat sasaran, diharapkan pendapatan masyarakat meningkat dan angka kemiskinan dapat ditekan secara berkelanjutan.

Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mendistribusikan sumber daya ekonomi melalui berbagai program pembangunan, subsidi, dan bantuan sosial. Secara umum, pengeluaran pemerintah mencakup seluruh belanja negara yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan nasional. Pengeluaran pemerintah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintah seperti belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, dan pengeluaran lainnya yang bersifat administratif. Sementara itu, pengeluaran pembangunan diarahkan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur, baik secara fisik maupun nonfisik.

Pengeluaran pemerintah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Todaro dan Smith (2020) menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, dapat memperbaiki akses masyarakat terhadap

layanan dasar serta meningkatkan kualitas hidup kelompok berpendapatan rendah. Sejalan dengan Juanda dan Siregar (2023) menjelaskan bahwa belanja negara yang diarahkan pada sektor-sektor produktif mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan ekonomi, serta memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat miskin. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen yang berpotensi mendukung upaya pengurangan kemiskinan.

Perkembangan pengeluaran pemerintah di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Gambar 1.2 pengeluaran pemerintah selama periode 2019 hingga 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024.

Gambar 1. 2 Pengeluaran Pemerintah di Indonesia Tahun 2019-2024 (Miliar rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.2, pengeluaran pemerintah dari tahun 2019 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019,

pengeluaran pemerintah tercatat sebesar Rp2.309.287,3 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat menjadi Rp2.595.481,1 miliar rupiah pada tahun 2020. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp2.786.441,4 miliar rupiah, kemudian naik menjadi Rp3.096.262,7 miliar rupiah pada tahun 2022. Pada tahun 2023, pengeluaran pemerintah tercatat sebesar Rp3.123.677,3 miliar rupiah dan terus meningkat hingga mencapai Rp3.325.118,90 miliar rupiah pada tahun 2024.

Fenomena hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kemiskinan di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program sosial pada dasarnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mampu memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan karena belanja pemerintah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas publik serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Namun di sisi lain, fenomena yang terjadi juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak selalu berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang efektifnya alokasi anggaran, ketidaktepatan sasaran program, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah yang menyebabkan manfaat pengeluaran pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat miskin.

Secara teoritis, hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui teori ekonomi Keynesian. Menurut Mankiw (2021), peningkatan belanja pemerintah akan mendorong permintaan agregat yang selanjutnya meningkatkan aktivitas produksi, memperluas kesempatan kerja, dan menaikkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan tersebut pada akhirnya dapat menurunkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial memiliki peran penting dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah. Todaro dan Smith (2020) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal yang difokuskan pada sektor sosial mampu meningkatkan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Belanja pada sektor pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja, sementara pengeluaran di bidang kesehatan dapat meningkatkan produktivitas melalui perbaikan derajat kesehatan. Selain itu, investasi pada infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas wilayah, menurunkan biaya distribusi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak pada penurunan kemiskinan. Dengan demikian, secara teoritis pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, artinya peningkatan belanja negara yang tepat sasaran dan efisien berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan.

Penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan menunjukkan hasil yang beragam. Al-Mahdali dan Saharuddin (2023)

serta Karuniawan dan Soelistyo (2022) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti peningkatan belanja negara mampu menurunkan jumlah penduduk miskin melalui program sosial dan pembangunan infrastruktur. Namun, berbeda dengan Putri *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sehingga peningkatan anggaran belum tentu efektif menekan kemiskinan apabila tidak dialokasikan secara tepat dan efisien.

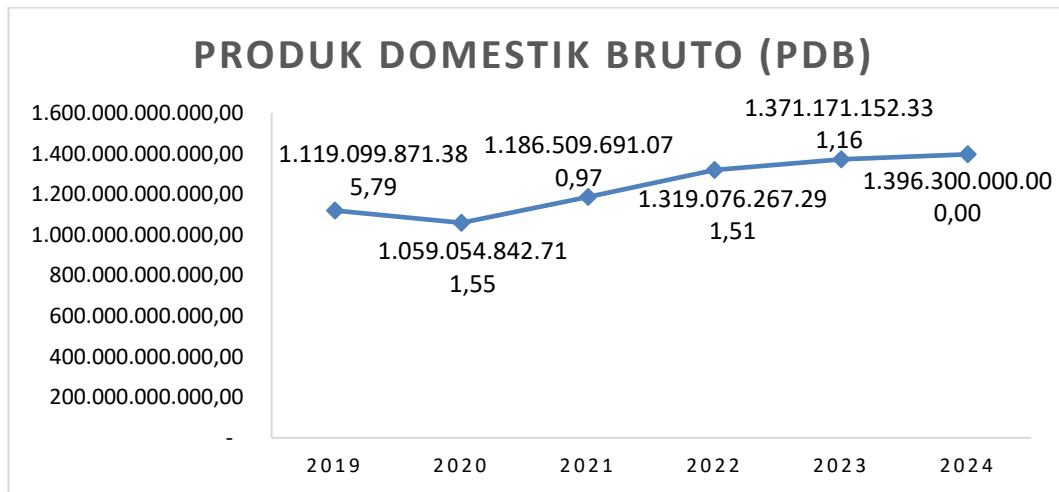
Selain pengeluaran pemerintah, faktor lain yang turut memengaruhi tingkat kemiskinan adalah produk domestik bruto. Jika pengeluaran pemerintah berperan melalui kebijakan fiskal dan alokasi anggaran, maka produk domestik bruto mencerminkan kondisi serta kinerja perekonomian secara keseluruhan. Produk domestik bruto merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Indikator ini mencakup seluruh aktivitas ekonomi domestik, baik dari sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi.

Peningkatan produk domestik bruto menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, kesempatan kerja cenderung bertambah sehingga masyarakat memperoleh sumber pendapatan yang lebih baik. Fitriani *et al.* (2023) menyatakan bahwa produk domestik bruto secara teoritis dapat menurunkan angka kemiskinan karena memberikan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Todaro dan Smith (2020) dalam Destoprani *et al.* (2021) menjelaskan bahwa produk domestik bruto mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Secara teori, peningkatan kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya menaikkan pendapatan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, sehingga berpotensi menurunkan kemiskinan. Dengan demikian, semakin tinggi produk domestik bruto suatu negara, maka kemiskinan cenderung mengalami penurunan.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan produk domestik bruto tidak selalu secara otomatis mampu mengurangi kemiskinan. Apabila pertumbuhan tersebut tidak disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan, maka manfaatnya belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan produk domestik bruto perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu mendorong pemerataan ekonomi. Penelitian Sari dan Putra (2022) menunjukkan bahwa produk domestik bruto berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi yang stabil cenderung menurunkan kemiskinan.

Berikut Gambar 1.3 perkembangan produk domestik bruto di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024 adalah sebagai berikut:



Sumber Data : World Bank, 2024.

Gambar 1.3 Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia Tahun 2019-2024 (US \$)

Berdasarkan Gambar 1.3 menunjukkan bahwa produk domestik bruto Indonesia periode 2019–2024 mengalami fluktuasi yang dipengaruhi kondisi ekonomi global dan domestik. Produk domestik bruto Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2020 setelah sebelumnya berada pada posisi 1.119 US\$ pada tahun 2019. Pada tahun 2020, produk domestik bruto turun menjadi 1.059 US\$ akibat kontraksi ekonomi yang terjadi selama pandemi COVID-19.

Setelah mengalami penurunan, produk domestik bruto Indonesia mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 1.186 US\$. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2022 sebesar 1.319 US\$, tahun 2023 sebesar 1.371 US\$, dan diperkirakan mencapai 1.396 US\$ pada tahun 2024. Tren kenaikan ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi kembali meningkat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.

Fenomena hubungan antara produk domestik bruto dan kemiskinan di Indonesia juga menunjukkan keterkaitan yang penting dalam proses pembangunan

ekonomi. Peningkatan produk domestik bruto mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperluas kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa produk domestik bruto dapat berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan melalui peningkatan aktivitas produksi dan pendapatan masyarakat. Namun demikian, fenomena yang terjadi juga menunjukkan bahwa peningkatan produk domestik bruto tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan secara signifikan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan dan belum meratanya hasil pembangunan ekonomi, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah.

Produk domestik bruto merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Dalam kerangka teori pertumbuhan ekonomi, peningkatan produk domestik bruto mencerminkan bertambahnya aktivitas produksi dan ekspansi ekonomi yang berpotensi memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari kenaikan produk domestik bruto diyakini memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan, artinya semakin tinggi produk domestik bruto maka tingkat kemiskinan cenderung menurun.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah, serta perluasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Pandangan ini sejalan dengan teori pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2020), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan fondasi penting dalam upaya pengurangan kemiskinan, terutama apabila disertai dengan kebijakan distribusi yang adil dan pembangunan yang bersifat inklusif.

Penelitian mengenai pengaruh produk domestik bruto menunjukkan bahwa memiliki hubungan dengan kemiskinan, dengan arah pengaruh yang berbeda-beda. Suliswanto (2010) menemukan bahwa pengaruh produk domestik bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan jumlah penduduk miskin melalui peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Sejalan dengan Erfiana *et al.* (2025) juga menyimpulkan bahwa pengaruh produk domestik bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga semakin tinggi aktivitas ekonomi suatu negara maka semakin besar peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraannya. Namun berbeda dengan Ksatria *et al.* (2022) yang menemukan bahwa pengaruh produk domestik bruto berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengaruh produk domestik bruto tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan apabila pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan. Dengan demikian, dampak pengaruh produk domestik bruto terhadap kemiskinan sangat bergantung pada kualitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

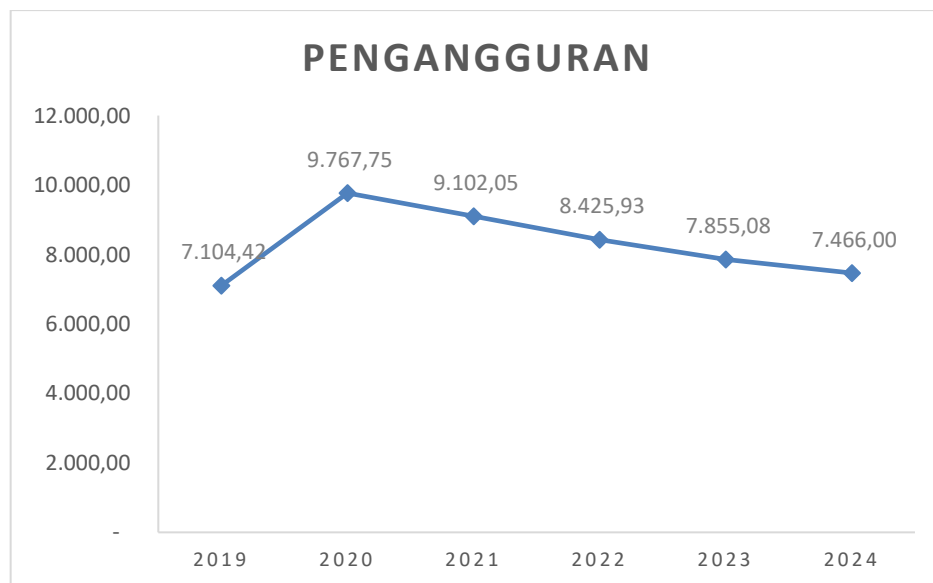
Selain pengeluaran pemerintah dan produk domestik bruto, pengangguran mempengaruhi kemiskinan. Pengangguran merupakan salah satu masalah yang mempengaruhi kondisi dan kinerja perekonomian di suatu daerah. Adapun pihak-pihak pengangguran biasanya disebut juga orang yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun disebut juga dengan orang yang sedang mencari pekerjaan. Artinya banyak tenaga kerja yang sulit mendapatkan pekerjaan karena jumlah lapangan pekerjaan yang sedikit (Maulana & Azfar, 2022).

Pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam analisis makroekonomi yang berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Rahmah et al. (2023), pengangguran adalah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian. Sejalan dengan Simanungkalit (2023) menyatakan bahwa pengangguran memiliki pengaruh langsung terhadap kemiskinan karena individu yang tidak bekerja akan kehilangan sumber pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengangguran, maka jumlah penduduk miskin cenderung meningkat.

Secara teori, terdapat hubungan positif antara pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan pengangguran menyebabkan bertambahnya individu yang tidak memperoleh pendapatan, sehingga meningkatkan risiko masuk ke dalam kategori penduduk miskin. Oleh karena itu, pengurangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui peningkatan pertumbuhan

ekonomi yang inklusif, efektivitas pengeluaran pemerintah, serta penurunan tingkat pengangguran secara berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja yang produktif (Handayani, 2021).

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perkembangan pengangguran di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Berikut Gambar 1.4 perkembangan pengangguran di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024 adalah sebagai berikut:



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2024.

Gambar 1. 4 Pengangguran di Indonesia Tahun 2019-2024 (Ribu Jiwa)

Berdasarkan Gambar 1.4 pengangguran di Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan 2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2019, jumlah pengangguran tercatat sebesar 7.104,42 ribu jiwa. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan pada tahun 2020 menjadi 9.767,75 ribu jiwa.

Kenaikan ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi, pembatasan kegiatan masyarakat, serta meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor usaha.

Pada tahun 2021, jumlah pengangguran mulai menurun menjadi 9.102,05 ribu jiwa dan terus mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 8.425,93 ribu jiwa. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2023 menjadi 7.855,08 ribu jiwa dan pada tahun 2024 tercatat sebesar 7.466,00 ribu jiwa. Penurunan tersebut menunjukkan adanya proses pemulihan ekonomi nasional yang berdampak pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian, fluktuasi jumlah pengangguran tersebut tetap menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat kemiskinan.

Fenomena hubungan antara pengangguran dan kemiskinan di Indonesia menunjukkan adanya keterkaitan yang erat dalam kondisi perekonomian masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia sehingga sebagian masyarakat tidak memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran cenderung diikuti oleh meningkatnya kemiskinan karena masyarakat yang tidak bekerja kehilangan sumber pendapatan dan mengalami penurunan daya beli. Namun demikian, fenomena yang terjadi juga menunjukkan bahwa pengangguran tidak selalu secara langsung meningkatkan kemiskinan, karena dalam beberapa kondisi masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi,

seperti keberadaan sektor informal, dukungan keluarga, serta kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan program perlindungan sosial.

Secara teoritis, pengangguran memiliki hubungan yang erat dengan kemiskinan. Menurut Sukirno (2021), peningkatan pengangguran akan menyebabkan menurunnya pendapatan rumah tangga karena hilangnya sumber penghasilan utama, sehingga daya beli masyarakat melemah dan risiko jatuh ke dalam kemiskinan menjadi lebih tinggi. Dalam teori ekonomi tenaga kerja, pekerjaan merupakan sumber utama pendapatan yang menentukan tingkat kesejahteraan individu maupun rumah tangga. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan menjadi terbatas, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada pendapatan harian.

Penelitian mengenai pengaruh pengangguran menunjukkan bahwa memiliki hubungan yang erat dengan kemiskinan. Simanungkalit (2023) menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti peningkatan jumlah pengangguran cenderung diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk miskin. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Rahmaningtyas *et al.*, (2023) dan Fitri *et al.*, (2024), yang menyatakan bahwa pengangguran menjadi salah satu faktor utama yang mendorong naiknya angka kemiskinan karena berkurangnya pendapatan masyarakat. Selain itu, penelitian Ozimsekwutosi (2023) turut memperkuat hasil tersebut dengan menunjukkan bahwa tingginya pengangguran berdampak langsung pada meningkatnya kemiskinan. Secara umum, hasil-hasil penelitian tersebut

mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengangguran, maka semakin besar pula potensi peningkatan kemiskinan, karena terbatasnya kesempatan kerja menyebabkan masyarakat kehilangan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penelitian sebelumnya mengenai kemiskinan di Indonesia hanya mengkaji satu atau dua variabel secara terpisah, seperti pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, atau pengangguran terhadap kemiskinan. Sementara itu, penelitian ini memfokuskan pada pengaruh pengeluaran pemerintah, produk domestik bruto, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia secara bersama-sama dalam satu model analisis. Penelitian ini menggunakan data *time series* periode 1992–2024 sehingga dapat menggambarkan perkembangan variabel dalam jangka panjang serta mencakup berbagai kondisi perekonomian, mulai dari masa krisis hingga periode pemulihan. Dengan menganalisis ketiga variabel tersebut secara simultan dan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Bruto, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia.”** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh produk domestik bruto terhadap kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, produk domestik bruto dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia?
2. Mengetahui pengaruh produk domestik bruto terhadap kemiskinan di Indonesia?
3. Mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia?
4. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, produk domestik bruto dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teori ekonomi pembangunan, khususnya terkait pengaruh pengeluaran pemerintah,

produk domestik bruto, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia.

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan variabel makroekonomi dan kemiskinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan masukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan pengeluaran pemerintah, peningkatan produk domestik bruto, dan penurunan angka pengangguran.
2. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia, khususnya peran pengeluaran pemerintah, produk domestik bruto, dan pengangguran.